Analisis Game Theory Pada Konflik Politik Lokal Di Kabupaten Mentawai Pada Tahun 1999

¹Aufa Rizky Fan Surya, ²Tamrin, ³Irawati.

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Email: aufasurya34@gmail.com

Abstrak

Proses desentralisasi di Indonesia telah dilakukan bahkan sejak zaman penjajahan. Otonomi daerah di Indonesia terus mengalami berbagai perubahan dan dampak terhadap konstelasi politik di daerah. Dampak dari adanya otonomi daerah adalah konflik politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu daerah yang mengalami konflik politik lokal adalah Kabupaten Mentawai pada tahun 1999. Untuk menjelaskan dan menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik literature study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus politik lokal di Kabupaten Mentawai dipengaruhi oleh kelas menengah yakni IPMEN dan penggunaan politik identitas untuk mendapatkan posisi strategis di pemerintahan daerah dan DPRD. Kasus di Kabupaten Mentawai dapat dianalisis dengan game theory yaitu zero sum game yang menjelaskan keuntungan atau kemenangan masyarakat Mentawai dalam konflik politik lokal.

Kata Kunci: Desentralisasi; Politik Lokal; Konflik.

Abstract

The decentralization process in Indonesia has been carried out since the colonial era. Regional autonomy in Indonesia continues to experience various changes and impacts on regional political constellations. The impact of regional autonomy is political conflict that occurs at the local level. One of the areas that experienced local political conflict was Mentawai Regency in 1999. To explain and analyze this case, the author uses a qualitative approach with techniques literature study. The results of this research show that local political cases in Mentawai Regency are influenced by the middle class, namely IPMEN and the use of identity politics to obtain strategic positions in the regional government and DPRD. Cases in Mentawai Regency can be analyzed using game theory that is zero sum game which explains the advantages or victories of the Mentawai people in local political conflicts.

Keywords: Decentralization; Local Politics; Conflict.

PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia telah mengalami proses panjang. Desentralisasi di Indonesia bahkan telah dilaksanakan pada masa penjajahan Belanda. Ketentuan otonomi daerah saat penjajahan Belanda diatur dalam Decentralisatiewet 1903 yang menjelaskan bahwa wilayah di Hindia

Belanda (Indonesia) dibentuk daerah-daerah otonom setingkat keresidenan dan kota di Jawa dan Madura. Ketentuan ini dilanjutkan dalam Bestuurshervormingwet 1922 yang membentuk keresidenan Palembang, Sumatera Barat, Medan dan Makasar pada tahun 1938.

Suasana desentralisasi di Indonesia bagaikan pendulum yang menarik sentralisasi ke desentralisasi dari waktu ke waktu (Sufianto, 2020: 285). Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, suasana sentralisasi lebih terasa karena diciptakan untuk meringankan beban penjajah dan menjaga daerah jajahan. Setelah kemerdekaan pendulum perlahan menarik ke arah desentralisasi. Pada tahun 1945, Indonesia mulai memberikan desentralisasi kepada daerah-daerah untuk mengurus urusannya sendiri tanpa rincian yang jelas. Masa orde lama, diterapkannya otonomi rill atau desentralistik namun implementasinya tidak berjalan efektif.

Pada kepemimpinan Soeharto, desentralisasi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengganti prinsip otonomi rill menjadi otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab. Namun dalam prakteknya, otonomi ini justru memberikan banyak urusan pada pemerintahan daerah tetapi dengan kewenangan yang sedikit. Pada implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebabkan suasana desentralisasi di Indonesia berarah ke

sentralisasi dibuktikan dengan kuatnya aktivitas dekonsentrasi.

Setelah reformasi 1998, desentralisasi di Indonesia kembali mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah di Indonesia kembali dengan memperkuat desentralisasi di tingkat kabupaten/kota. Namun undang-undang tersebut memperlemah posisi pemerintahan provinsi. Otonomi daerah di provinsi kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dan pendulum desentralisasi di Indonesia kemudian memberikan keseimbangan kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berjalannya desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia, mengakibatkan dinamika politik yang terjadi di nasional maupun tingkat lokal. Dengan terjadinya reformasi, dinamika politik di Indonesia mengalami era baru yaitu terjadinya desentralisasi besar-besaran kekuasaan pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi tersebut menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku politik seperti pemerintah daerah, politik lokal, organisasi non pemerintah

dan elit lokal. Pemerintahan daerah kerap kali menjadi kebal terhadap intervensi pusat (Nordholt dan Klinken, 2007: X).

Politik lokal kekurangan pamornya saat awal kemerdekaan karena pemerintahan saat itu sangat sentralistik pada politik nasional dan perjuangan kesatuan sangat kuat saat itu. Terlebih lagi era Orde Baru membuat pemerintah pusat sangat kuat dan melemahkan pemerintahan daerah. Sejak Reformasi 1998, era baru dalam dinamika politik daerah seperti aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran dalam politik lokal. Dinamika ini ditulis lebih lanjut dalam buku "Politik Lokal di Indonesia" Karya Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken pada tahun 2007. Dalam bukunya ia susun dari 22 peneliti internasional dan nasional yang menjelaskan bagaimana dinamika politik lokal sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah di Indonesia.

Di tingkat daerah, budaya dan nilai-nilai lokal tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik. Sempat tertahan saat Orde Baru, politik lokal memainkan panggungnya setelah adanya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Politik lokal yang terjadi di semua daerah di Indonesia mengalami berbagai

perubahan yang dirasakan. Banyak yang berujung pada konflik lokal dan perselisihan antar elite di tingkat lokal. Penerapan Desentralisasi yang dianggap terburu-buru ini menurut Nordholt dan Klinken disebabkan pengabaian pusat pada kemajemukan Indonesia dari sisi penduduk, budaya, bahasa dan sejarah yang akibatnya politik lokal yang menerapkan otonomi daerah menyebabkan berbagai permasalahan seperti klientelisme, konflik antar suku dan elit dan korupsi di tingkat lokal (Nordholt dan Klinken, 2007: X).

Konflik politik lokal yang terjadi di Indonesia baik sebelum adanya otonomi daerah atau setelah adanya otonomi daerah, selalu diakomodasi oleh pusat untuk penyelesaiannya. Beberapa konflik yang terjadi dalam konflik politik lokal berakhir pada kekalahan salah satu pihak dan beberapa konflik lainnya berakhir pada perdamaian pihak-pihak, Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas terkait analisis game theory pada konflik politik lokal di Mentawai.

METODE

Pada jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum yaitu sebuah metode penelitian yang menggunakan

cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat memberikan jawaban dengan mencurahkan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka atau study literature. Studi pustaka ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya berasal dari suatu bahan dokumenter, baik berupa surat kabar, majalan, artikel, film, naskah, atau sejenisnya.

Adapun dalam penulisan ini, penulis ingin mendeskripsikan konflik politik lokal yang terjadi di Kabupaten Mentawai pada tahun 1999 pasca Orde Baru dengan menggunakan sumber literatur yaitu buku yang berjudul "Politik Lokal di Indonesia" oleh Grindle dan Klinken.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis kasus konflik politik lokal yang berakhir pada kemenangan seluruh pihak dan yang berakhir pada kekalahan salah satu pihak, penelitian ini menggunakan teori

permainan (Game Theory). Teori ini merupakan pendekatan sistematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan (Mustaqim, 2013: 18). Teori ini digunakan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Situasi persaingan tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk yakni Zero Sum Game dan Non Zero Sum Game. Zero Sum Game (Permainan Berjumlah Nol) merupakan suatu permainan dimana jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan nol (Noorida, 2000: 3). Artinya salah satu pihak akan mengalami kemenangan (positif) dan pihak yang lain mengalami kekalahan (negatif) yang apabila dikalkulasikan menghasilkan angka nol. Dalam konflik sosial atau konflik politik, perjuangan menang atau kalah biasanya melibatkan tekanan politik dan fisik yang diakhiri dengan adanya pihak yang menang atau pihak yang kalah (Irfan, 2022: 29). Penyelesaian konflik politik lokal dengan zero sum game akan berdampak pada kekalahan pihak lain dan keuntungan atau kemenangan pada pihak lainnya.

Sedangkan Non Zero Sum Game (Permainan Berjumlah Tidak Nol) merupakan permainan dimana jumlah kemenangan kedua belah pihak atau pemain tidak berakhir pada hasil nol (Noorida, 2000: 3). Artinya kedua pihak secara bersamaan sama-sama mengalami keuntungan atau sama-sama mengalami kerugian yang dikalkulasikan maka hasilnya tidak sama dengan nol. Dalam konflik politik lokal, penyelesaian yang berakhir pada non zero sum game akan memberikan keuntungan kedua pihak atau kedua pihak sama-sama mengalami kekalahan atau kerugian.

Desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia berdampak pada munculnya konflik-konflik di tingkat lokal akibat pemerintahan daerah yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Kendati memberikan banyak peluang untuk pemerintahan daerah dapat mengatur sendiri urusan daerahnya, praktik desentralisasi di Indonesia banyak memunculkan konflik. Salah satu kasus yang dapat menjelaskan bagaimana konflik politik lokal dapat berakhir pada kemenangan salah satu pihak adalah kasus Kabupaten Mentawai di Sumatera Barat. Kasus pemekaran Mentawai merupakan contoh bagus untuk menjelaskan bagaimana isu etnis dapat

memberikan kemenangan pada pihak tertentu.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Mentawai merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Padang-Pariaman. Mentawai menjadi wilayah dari Kabupaten Padang-Pariaman yang memiliki sumbangan pendapatan terbesar sekitar tiga per empat total pendapatan kabupaten tersebut. Beberapa permasalahan yang terjadi di Mentawai pada masa orde baru (sebelum adanya otonomi daerah) adalah sebagai berikut:

1. Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman yang mengambil kekayaan alam yang ada di Mentawai tetapi tidak didistribusikan secara merata.
2. Posisi-posisi di pemerintahan seperti pegawai negeri sangat sulit dijangkau oleh masyarakat Mentawai karena adanya isu etnis dan agama bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang-Pariaman hanya dapat diisi oleh suku Minangkabau dan beragama muslim.
3. Akibat dari dua permasalahan tersebut, pembangunan di Mentawai sangat minim baik

sekolah, fasilitas umum, pertanian bahkan tempat ibadah.

Dari berbagai permasalahan tersebut, masyarakat asli Mentawai mengalami diskriminasi, diasingkan dan mendapatkan label yang buruk dari Pemerintahan Padang-Pariaman. Namun masyarakat asli Mentawai tidak tinggal diam dan memperjuangkan hak-hak mereka sejak tahun 1980-an. Perjuangan ini merupakan hasil pemikiran dan ketidakpuasaan para aktor intelektual di Mentawai yang mendapatkan pendidikannya di gereja. Pada tahun 1982, Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN) yang merupakan kelompok mahasiswa dan sarjana Mentawai yang tinggal di Padang memulai aksi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Mentawai. Kelompok ini mulai mempertanyakan hak mereka dan dengan cepat melahirkan masyarakat atau aktivis yang peduli terhadap isu etnis mereka.

Kejatuhan Orde Baru membuat perjuangan isu yang awalnya terkesan tersembunyi dan halus berubah menjadi tuntutan keras untuk pemisahan Mentawai dari Kabupaten Padang-Pariaman. Konflik yang terjadi antara

keduanya mulai menunjukkan titik terang setelah adanya pemberlakuan otonomi daerah dan Mentawai diakui sebagai kabupaten yang terpisah dari Padang-Pariaman pada tahun 1999. Kabupaten Padang-Pariaman kehilangan kuasanya terhadap Mentawai yang telah berstatus sebagai daerah otonomi baru. Para kaum intelektual Mentawai yang awalnya memperjuangkan “kebebasan” Mentawai dari Kabupaten Padang-Pariaman mulai mencari posisi strategis dalam pemerintahan.

Berdasarkan kasus tersebut, konflik politik dan ekonomi yang terjadi antara masyarakat Mentawai dan Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman dapat dianalisis dengan zero sum game. Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman “kalah” dari masyarakat Mentawai untuk tetap mempertahankan Mentawai sebagai bagian dari kabupaten tersebut. Pihak yang kalah dalam kasus ini adalah Kabupaten Padang-Pariaman yang kehilangan daerah dengan sumber pendapatan terbesar dan kehilangan legitimasi dari masyarakat Mentawai. Sedangkan pihak yang mengalami kemenangan dalam kasus ini adalah masyarakat Mentawai dan LSM-LSM lokal Mentawai khususnya IPPMEN yang

berhasil memperjuangkan otonomi daerah di Mentawai. Beberapa "keuntungan" yang didapatkan oleh pihak yang menang tersebut antara lain pertama, penguasaan terhadap posisi strategis di pemerintahan seperti bupati dan DPRD. Kedua penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki dan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan di Mentawai. Terakhir, adanya legitimasi kekuasaan yang didapatkan oleh para intelektual Mentawai dari masyarakat karena dicap sebagai putra asli daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia pada awalnya menimbulkan berbagai permasalahan atau konflik di tingkat lokal. Konflik politik tersebut dapat berakhir dimana salah satu pihak berakhir pada kekalahan dan pihak lain mengalami kemenangan atau zero sum game, sedangkan konflik lainnya berakhir pada kemenangan kedua pihak yang bertikai atau non zero sum game. Contoh kasus zero sum game adalah konflik Mentawai dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dimana kemenangan diperoleh oleh masyarakat Mentawai. Kabupaten Mentawai menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pemekaran

dan berakhir pada keberhasilan masyarakat Mentawai. Keberhasilan ini dapat dilihat dari bagaimana politik identitas di Kabupaten Mentawai digunakan untuk menguasai beberapa jabatan dan posisi penting dalam pemerintahan daerah serta peran kelompok cendekiawan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Mentawai.

REFENSI

- Irfan, M. (2022). Identifikasi Konflik di Indonesia: Studi Terhadap Kondisi dan Pemicu Tindakan kekerasan di Timor Timur dan Maluku-Ambon. *Islam & Contemporary Issues*, 2(1), 23-30.
- Mustaqim, K. (2013). Aplikasi Konsep Teori Permainan dalam Pengambilan Keputusan Politik: Studi Kasus Strategi Pemenangan PEMILUKADA Jawa Barat Tahun 2013 oleh Partai Politik (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Noorida, T. (2000). Perumusan Strategi Bisnis dengan Pendekatan "Game Theory". *Jurnal Teknik Industri*, 1(1), 1-10.
- Henk Schulte Nordholt, Gerry van Klinken. (2014). *Politik lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Saeri, M. Aplikasi Game Theory Dalam Studi Kasus Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Iran Oleh Amerika Serikat. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1), 1-12.

Sufianto, D. (2020). Pasang surut otonomi daerah di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(02), 271-288.

WU, T. W. (2010). Desentralisasi Asimetris dan/dalam Negara Kesatuan. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(2).